

BULETIN

Edisi 27 | Agustus 2025

PUKEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

PARAMARA

MEDIA KOMUNIKASI BPSDM KEMENTERIAN PU

80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

**DIREKTORAT IRIGASI DAN
RAWA BERKOMITMEN
MENDUKUNG
SWASEMBADA PANGAN**

**DIRGAHAYU
INDONESIA DARI
BRISBANE DAN DELFT**

**DARI PEGAWAI HARIAN
KE KEPALA BPSDM:
SEBUAH
PERJALANAN
PANJANG
INTEGRITAS
DAN LOYALITAS**

**Irigasi untuk
Swasembada
Pangan**



bpsdm.pu.go.id

PU 608



Efisiensi Investasi

ICOR < 6

Efisiensi Investasi

Efisiensi investasi dijabarkan melalui optimalisasi biaya, optimalisasi aset, dan kemudahan investasi.



Pengentasan Kemiskinan

Menuju 0%

Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan melalui percepatan penyediaan akses infrastruktur dasar dan penyerapan tenaga kerja



Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Mencapai 8%

Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan dukungan kawasan prioritas, perwujudan swasembada pangan, dan peningkatan konektivitas



PENGARAH

Kepala BPSDM Kementerian
PU

DEWAN REDAKSI

KETUA

Sekretaris Badan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

ANGGOTA

- Kepala Pusat Pengelolaan Talenta
- Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis
- Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

PEMIMPIN REDAKSI

Djadjat Djatnika

REDAKTUR PELAKSANA

Lamtiur Gustina

ANGGOTA REDAKSI

Astaf Aji Pranaya
Dipa Nuswantara
Djaty Waluyo Widodo
Nura Fitri Febriani
Muhammad Ridha Irsyad
Wahyu Abdhi Nugroho

ALAMAT REDAKSI

BPSDM Kementerian
Pekerjaan Umum Gedung
Heritage Lt.2, Jl. Pattimura
20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Merdeka X Kedaulatan Pangan

“Indonesia merdeka bukan tujuan akhir. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat.” – Bung Hatta

17 Agustus 2025 merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-80 merupakan peristiwa istimewa yang harus dimaknai dengan merdeka seutuhnya. Jangan ada lagi orang lapar, miskin atau haknya sebagai manusia tidak dilindungi oleh negara. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program Asta Cita yang diturunkan melalui kebijakan kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan merupakan dimensi lain dari merdeka seutuhnya. Artinya upaya mendorong ekonomi yang ekologis dan berkeadilan merupakan kewajiban dari setiap anak bangsa. Dirgahayu RI yang ke-80 ini mestinya menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusi nyata kepada negara. Jadilah generasi muda yang tidak hanya mengenang, namun meneruskan perjuangan.

Ceruk kedaulatan pangan bisa menjadi fokus generasi muda sebagai wujud pengabdian membangun Indonesia dari sisi ketersediaan pangan nasional, sekaligus mendorong perputaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan personal dan keluarga. Sebab merdeka bukan hanya bebas tapi ikut bertanggung jawab.

Sebagai dampaknya pangan tercukupi, ekonomi membaik, rakyat sejahtera. Itulah makna dari merdeka seutuhnya. Dirgahayu Indonesiaku. ■

Selamat membaca

Redaksi

JARINGAN IRIGASI

KUNCI DISTRIBUSI AIR YANG EFISIEN UNTUK PERTANIAN

Jaringan irigasi merupakan sistem terorganisir yang dirancang untuk mengalirkan air dari sumbernya ke lahan pertanian secara merata, terutama di daerah yang curah hujannya tidak menentu.

Sistem Irigasi dibagi menjadi 3 jenis



Jaringan Irigasi Primer adalah saluran utama yang menerima air langsung dari sumber air seperti bendungan atau sungai kemudian didistribusikan ke jaringan irigasi primer.



Jaringan Irigasi Sekunder adalah saluran yang menerima air dari jaringan irigasi primer lalu didistribusikan ke jaringan irigasi tersier serta area yang lebih kecil.



Jaringan Irigasi Tersier adalah bagian terakhir dari sistem irigasi yang menerima air dari jaringan irigasi sekunder serta mengalirkan ke petak sawah atau kebun kecil.

Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

 **Pemerintah Pusat**

 **Daerah Irigasi >3.000 ha**

 **Lintas Negara, Lintas Provinsi, Strata Nasional**

 **Pemerintah Provinsi**

 **1.000 ha - 3.000 ha**

 **Lintas Kab/Kota**

 **Pemerintah Kab/Kota**

 **Daerah Irigasi <1.000 ha**

 **Utuh Kab/Kota**





Navigasi

PARAMPARA EDISI 27 - AGUSTUS 2025



Fokus

DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA BERKOMITMEN Mendukung Swasembada Pangan

06 Direktorat Irigasi dan Rawa, di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan. ●

Inside

BUKA 2 PROGRAM STUDI BARU, MAGISTER SUPER SPESIALIS KEMENTERIAN PU SIAP DUKUNG KEDAULATAN PANGAN NASIONAL

20 Pemerintah Indonesia tengah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka menjamin kedaulatan pangan nasional. Pasalnya saat ini dunia tengah mengalami krisis pangan. Program Pangan Dunia atau *World Food Programme* (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Karena itu program kedaulatan pangan nasional harus segera dimulai sesegara mungkin. ●

Trending

DIRGAHAYU INDONESIA DARI BRISBANE DAN DELFT, CERITA RIAN MANTASA X BAGAS MAHADIKA

26 Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI di luar negeri menjadi salah satu yang dinantikan oleh diaspora Indonesia dan khususnya oleh para karya siswa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang tengah menjalani pendidikan lanjutan di luar negeri. ●

Rubrik

Periskop	3
Navigasi	5
Fokus	6
Opini	18
Inside	20
Komunitas	24
Trending	26
Sosok	28
Galeri	31
Karikatur	34

Opini

MANUSIA MERDEKA: REFLEKSI KEBERPIHAKAN DJANBI, PENDIRI PASUKAN ELIT TNI AD

18 Ada yang lebih abadi daripada debu dan darah di medan perang. Dalam kisah perjuangan perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949), sebuah keputusan diambil, sunyi tapi bergema hingga kini. Keputusan seorang prajurit untuk menjadi manusia merdeka merupakan sebuah pelajaran berharga. ●



PARAMPARA adalah buletin/majalah internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum, dan diharapkan menjadi salah satu alat/media komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan informasi dan komunikasi di lingkungan SDM-PU.



■ Pt. Direktur Irigasi dan Rawa, Yosiandi Radi Wicaksono saat diwawancarai

Direktorat Irigasi dan Rawa Mendukung Swasembada Pangan

PEMBANGUNAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI INI MENJADI PRIORITAS UTAMA DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN.

TIM REDAKSI

Direktorat Irigasi dan Rawa, di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan. Dukungan ini diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta optimalisasi lahan rawa di berbagai daerah strategis Indonesia.

Pt. Direktur Irigasi dan Rawa, Yosiandi Radi Wicaksono, menyampaikan bahwa keberadaan infrastruktur pengairan menjadi tulang punggung bagi sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan demi terwujudnya swasembada pangan.

“Swasembada pangan tidak bisa terwujud tanpa

ketersediaan air yang cukup dan terkelola dengan baik. Untuk itu, kami terus mengembangkan dan memperkuat sistem irigasi di wilayah lumbung pangan nasional. Sudah menjadi tupoksi kami menyediakan infrastruktur irigasi mulai dari pembangunan bendungan, saluran primer,



Berkomitmen pada Pangan

hingga saluran sekunder. Selain itu kami juga mereklamasi rawa untuk pembukaan lahan. Kemudian terkait jaringan tersier, dulunya merupakan kewenangan dari Kementerian Pertanian (Kementan), namun di tahun 2025 ini melalui Inpres kami juga masuk ke jaringan tersier,” ujar Yosiandi saat ditemui tim redaksi Parampara di ruang kerjanya.

Menurut Yosiandi, pembangunan irigasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia (SDM) petani dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. “Kami tidak hanya membangun saluran, tetapi juga membangun sistem. Kolaborasi dengan Kementan,

pemerintah daerah, serta kelompok tani menjadi kunci agar infrastruktur ini benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pangan,” ucapnya.

Partisipasi masyarakat khususnya petani, dalam sistem pengelolaan irigasi berbasis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan elemen krusial akan keberhasilan sistem irigasi partisipatif di Indonesia dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

“Terkait operasi dan pemeliharaan itu menjadi ranahnya Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP), mereka punya program irigasi partisipatif. Melalui Bina OP ini optimalisasi lahan (Oplah) di lokasi yang tidak terjangkau alat berat, kami dapat melakukan penanganan rehabilitasinya secara partisipatif dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sifatnya mungkin bisa disebut padat karya, jadi di sana mereka yang mengerjakan kami yang menyediakan upah kerjanya. Dalam P3-TGAI atau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, mereka melakukan usulan penanganan dan merencanakan apa yang harus dilaksanakan di saluran mereka, kemudian membuat *planning* dan *budgeting*, serta melakukan usulan programnya. Mereka juga nantinya melaksanakan dan menyusun laporan, hingga pertanggungjawaban. Harapannya, dengan partisipatif itu mereka punya dorongan agar ke depannya dapat lebih aktif dalam melakukan pemeliharaan,” ujar Yosiandi yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda.

Terkait sudah sejauh mana sistem irigasi di sentra produksi pangan dapat membantu swasembada pangan dalam jangka waktu panjang, dirinya menjelaskan, “Fungsi irigasi itu untuk mensuplai air terutama di musim tanam ketiga. Kalau musim tanam pertama dan kedua maka praktis mengandalkan dari air hujan sudah lumayan cukup, walaupun dari periode umur padi tertentu membutuhkan suplai irigasi. Jadi dengan adanya saluran irigasi ini kami mengantarkan air dari sungai ke sawah secara gravitasi. Selama ini program Kementan berupa pompanisasi, tapi dengan pompa ini kami juga berpikir tentang operasional bahan bakar. Dengan irigasi kami menyediakan air secara gravitasi, jadi lebih hemat biaya operasional dibanding dengan apa yang disuplai dari pompa,” terangnya.

Yosiandi kembali menegaskan bahwa pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi ini menjadi prioritas utama dalam mendukung ketahanan pangan. “Kalau periode saat ini kami prioritas untuk mendukung Direktorat Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi di direktorat tersebut terdapat program optimalisasi lahan, yaitu program swasembada pangan seluas dua juta hektar dengan target penambahan produksi. Kami menyusun program tersebut untuk mendukung berbagai lokasi dari 2 juta hektar tersebut. Data sebaran lokasi tersebut kami turunkan melakukan verifikasi, kira-kira di lokasi tersebut perlu penanganan apa untuk saluran airnya dan bagaimana peningkatannya. Semua ini untuk memastikan ketersediaan air pada lokasi



■ Daerah Irigasi Rentang, Jawa Barat (Foto: Kompu SDA)



■ Bendung Gumbasa, Daerah Irigasi Gumbasa, Sulteng (Foto: Kompu SDA)



■ Bendung Daerah Irigasi Perjaya Sumatera Selatan (Foto: Kompu SDA)



■ Daerah Irigasi Saddang Sulawesi Selatan (Foto: Kompu SDA)

tersebut untuk meningkatkan produksi pangan,” urainya.

Sejumlah tantangan juga harus dihadapi pihaknya dalam pembangunan irigasi atau pemeliharaan infrastruktur di lahan rawa dan daerah terpencil. Mulai dari ketidaksinkronan dengan Kementan, terbatasnya kewenangan, hingga alih fungsi lahan.

“Jadi tantangan pertama untuk irigasi ini adalah sinkronisasi dengan Kementan. Kami kadang sudah membangun irigasi saluran primer dan sekunder tapi ternyata dari Kementan tidak turun ke situ, sehingga terjadi *miss*, tapi sekarang kami sudah mulai sinkronisasi dengan mereka. Mulai periode ini kami sudah memberikan data terkait lokasi pembangunan, kami serahkan ke Kementan nanti untuk menjalankan program mereka di lokasi tersebut. *Alhamdulillah* sudah sinkron pada saat ini,” ucapnya penuh syukur.

Yosiandi juga mengatakan bahwa selama ini pihaknya membangun irigasi mulai dari bendungan, saluran primer, saluran sekunder, namun belum menyentuh ke tersier karena memang secara pembagian kewenangan tersier pada waktu itu masih di kewenangan daerah atau kewenangan Kementan.

“Hal itu selalu menjadi isu permasalahan yang sering diangkat Menteri Pertanian, di mana kami melakukan program

pembangunan irigasi terus-menerus sementara produksi luas tanahnya tetap statis. Hal ini karena memang sebagian airnya belum masuk ke tersier. Jadi di Inpres yang sekarang kami diberikan kewenangan untuk bisa menyelesaikan ke level tersier. Harapannya nanti air itu bisa sampai ke lahan yang nantinya juga lebih bermanfaat bagi petani di sana,” imbuhnya.

Tantangan lainnya adalah alih fungsi terutama untuk lokasi lahan rawa di mana saluran air di daerah tersebut saling berpotongan atau menyilang satu sama lain (*crossing*), dan mengalami proses pengendapan material

sedimen khas lingkungan rawa. “Rawa itu sebagian besar ada di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Kalau di Sumatera dan Kalimantan itu kendalanya adalah alih fungsi lahan karena lokasi rawa ini memiliki kandungan kalkopirit yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya saluran tersebut terjadi *crossing* atau sedimentasi dan tidak segera ditangani, proses pencucian lahan itu akan terhambat, hingga akhirnya produktivitas lahannya menurun. Karena turunnya produktivitas maka penduduk setempat mulai putus asa, sehingga mulailah menanam sawit di situ,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya terus berusaha menjaga semua irigasi tetap fungsional dalam mendukung swasembada pangan. “Sekarang ini luas lahan tanam kami 10 juta hektar dan arahan dari Bapak Menteri dan Presiden supaya terdapat peningkatan luas tanam. Hal ini menjadi tantangan buat kami, karena tahun ini terdapat peningkatan menjadi 11 juta hektar, kemudian 12 juta hektar di tahun depan. Tentunya

kami perlu sinkronisasi program, mana saja irigasi yang kami tangani dengan Kementan. Jadi irigasi kami tangani, ketersediaan air kami jamin. Kemudian tidak cukup di situ, Kementan juga harus mendukung sub-prodinya, dukungan alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk petani, dan juga kepastian untuk petani terhadap harga jual gabahnya. Jadi intinya sinergisitas antara Kementerian PU dan Kementan itu sangat penting,” tutup Yosianti. ■



FUNGSI IRIGASI ITU UNTUK MENSUPLAIR AIR TERUTAMA DI MUSIM TANAM KETIGA. KALAU MUSIM TANAM PERTAMA DAN KEDUA MAKA PRAKTIS MENGANDALKAN DARI AIR HUJAN SUDAH LUMAYAN CUKUP, WALAUPUN DARI PERIODE UMUR PADI TERTENTU MEMBUTUHKAN SUPLAIR IRIGASI.



■ Bendung Curug Daerah Irigasi Tarum Timur, Jawa Barat (Foto: Kompu SDA)



■ Bendung Benteng Daerah Irigasi Saddang, Sulawesi Selatan (Foto: Kompu SDA)



Kementerian PU Dukung Kedaulatan Pangan Nasional Melalui Optimalisasi Infrastruktur Irigasi



■ Bersama Menteri PU meninjau salah satu proyek infrastruktur irigasi dan rawa

PEMERINTAH INDONESIA TENGAH MEMPERSIAPKAN SEJUMLAH LANGKAH STRATEGIS MENUJU CITA-CITA INDONESIA MAJU. SALAH SATU LANGKAH STRATEGIS ITU ADALAH MEMPERKUAT KEDAULATAN PANGAN NASIONAL.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kedaulatan pangan adalah syarat mutlak sebuah negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Produksi pangan dalam negeri adalah fondasi utama bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kepala negara meminta semua kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung penuh langkah strategis pemerintah.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU, A. Adi Umar Dani, mengatakan Kementerian PU akan *all out* mendukung program utama pemerintah tersebut melalui pembangunan infrastruktur pendukung pangan dan pertanian, seperti

mengoptimalkan irigasi pertanian dan pembenahan infrastruktur irigasi.

“Optimalisasi OP Irigasi yang dilakukan Direktorat Bina OP antara lain implementasi Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT), pengaturan waduk, optimalisasi jaringan utama dan tersier, penguatan kelembagaan Komisi Irigasi dan P3A, pelaksanaan irigasi partisipatif, pemantauan kinerja infrastruktur seperti IKSI, antisipasi kekeringan dan manajemen banjir,” kata Dani dalam bincang santai dengan redaksi Parampara.

Lebih lanjut, Dani menjelaskan bahwa Kementerian PU siap berkolaborasi menyukseskan visi Presiden melalui pembangunan infrastruktur pendukung program pertanian dan ketahanan pangan untuk mengejar swasembada di tahun 2029.

“Kita akan menyesuaikan sinkronisasi program strategis dengan RPJMN dan visi Presiden yaitu bendungan, jaringan irigasi baru, modernisasi irigasi, penyusunan kebijakan teknis seperti alokasi air berbasis efisiensi dan keadilan



distribusi, integrasi data spasial antara lahan pertanian dan jaringan irigasi, sistem informasi sumber daya air terpadu, serta harmonisasi kebijakan antar K/L untuk program satu peta dan satu data irigasi nasional,” tambahnya.

INOVASI TERBARU

Sebagai salah satu pendukung utama program ketahanan pangan nasional, Direktorat Bina OP dituntut menjaga keandalan sistem irigasi nasional, untuk mendukung produksi pangan. Penguatan itu dilakukan melalui penguatan jaringan irigasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menelaraskan program kerja dengan prioritas nasional bidang pangan.

Direktorat Bina OP juga terus mengembangkan sejumlah inovasi terbaru untuk memastikan sistem irigasi nasional berjalan dengan baik dan memberikan dampak signifikan terhadap target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Sistem pemantauan pelaksanaan Inpres (SiPantau) untuk memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden tentang irigasi dan ketahanan pangan berjalan tepat waktu. Kemudian kami melakukan penerapan *smart water management* dan *telemetry* untuk irigasi presisi dan responsif terhadap dinamika iklim,” katanya.

Direktorat Bina OP juga aktif menggunakan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan program irigasi nasional. Beberapa di antaranya seperti GIS untuk pemetaan aset dan daerah rawan bencana, e-PAKSI untuk pengelolaan aset dan evaluasi teknis irigasi, SMOPI untuk pelaporan O&P digital, *Smart Irrigation System* di beberapa daerah irigasi prioritas, Pusat Monitoring Bendungan (PMB) dengan EWS, InSAR, *remote sensing*, serta Sistem *Early Warning* dan *Smart Water Management* untuk risiko daya rusak air telah aktif digunakan.

PELUANG DAN TANTANGAN

Peran Direktorat Bina OP dalam menyuplai air terhadap program pertanian dan ketahanan pangan tentu saja memiliki sejumlah tantangan.



OPTIMALISASI OP
IRIGASI YANG DILAKUKAN
DIREKTORAT BINA OP
ANTARA LAIN IMPLEMENTASI
RENCANA ALOKASI
AIR TAHUNAN (RAAT),
PENGATURAN WADUK,
OPTIMALISASI JARINGAN
UTAMA DAN TERSIER,
PENGUATAN KELEMBAGAAN
KOMISI IRIGASI DAN P3A,
PELAKSANAAN IRIGASI
PARTISIPATIF, PEMANTAUAN
KINERJA INFRASTRUKTUR
SEPERTI IKSI, ANTISIPASI
KEKERINGAN DAN
MANAJEMEN BANJIR.

A. ADI UMAR DANI



Kendati demikian, Dani mengatakan bahwa pihaknya melihat peluang dalam setiap tantangan.

Dani mengatakan ada sejumlah tantangan besar yang membutuhkan solusi kreatif untuk membina sumber daya manusia terutama di lapangan, dimana berhubungan dengan teknis-teknis pemeliharaan.

“Masih diperlukan peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pengelola irigasi di lapangan, diperlukan penguatan pelatihan berjenjang, pembentukan jabatan fungsional OP, implementasi pelatihan berbasis *case study* di lapangan dan sistem pelaporan digital untuk pembelajaran berkelanjutan,” kata Dani.

Dalam hal pemeliharaan dan operasional, sumber daya manusia menjadi salah satu poin krusial yang perlu dibenahi karena memiliki tanggung jawab besar menjaga dan mengelola aset negara di berbagai daerah. Karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting demi menyediakan akses infrastruktur pendukung program kedaulatan pangan.

“Strategi kita antara lain meliputi pembinaan pelaksanaan RAAT, pemberian bimbingan teknis dan supervisi OP terhadap seluruh infrastruktur SDA, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja OP, pembinaan penilaian kondisi dan kinerja irigasi, serta penguatan kelembagaan OP,” pungkasnya. ●

Sekolah Rakyat: Wujud Nyata Merdeka Belajar dan Peran Strategis Kementerian PU



■ Bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono pada Program Sekolah Rakyat

GENERASI MUDA
ADALAH PEMIMPIN
MASA DEPAN. MEREKA
BISA MEMBANTU
DENGAN IDE-IDE KREATIF
BERBASIS DIGITAL
UNTUK MEMBUAT
PEMBANGUNAN LEBIH
EFISIEN, HEMAT, DAN
CANGGIH.

TIM REDAKSI

Program Sekolah Rakyat yang sejalan dengan semangat Merdeka Belajar kini memasuki babak baru. Pemerintah, melalui kolaborasi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, Kementerian Agama, serta Kementerian PU, tengah menyiapkan 100 lokasi sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan ini dimulai pada Juli 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Ir. Essy Asiah, M.T., menjelaskan bahwa Ditjen Prasarana Strategis (PS) memiliki peran sentral dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, baik negeri, swasta, maupun berbasis keagamaan. Selain itu, Ditjen PS juga membangun sarana ekonomi seperti pasar, fasilitas ibadah, rumah sakit pendidikan, hingga stadion olahraga bertaraf internasional.

“Untuk program Sekolah Rakyat, kami bekerja

sama dengan Kementerian Sosial. Ditjen PS PU fokus pada pembangunan dan renovasi infrastruktur yang bersifat masa transisi, termasuk desain tata ruang, penyediaan asrama, ruang kelas, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana pendukung lainnya,” ujar Essy saat ditemui tim redaksi Parampara.

Dirinya menerangkan, setiap kompleks Sekolah Rakyat akan berdiri di atas lahan minimal 6 hektar dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukungnya.

“Semua kebutuhan diatur agar anak-anak bisa fokus belajar. Asrama untuk SD (kapasitas ±1.000 siswa, 18 kelas), SMP, dan SMA. Ruang makan, kantin, dapur, dan ruang ibadah, serta fasilitas olahraga multifungsi. Untuk perlengkapan siswa seperti seragam, alat makan, dan perlengkapan pribadi disiapkan Kementerian Sosial. Sedangkan guru-guru berasal dari Kemendikdasmen dan Kemenag,” ucapnya.

Untuk menjaga keamanan, area asrama SD, SMP, dan SMA akan dipisahkan dengan pembatas guna mencegah perundungan. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dengan mempertimbangkan aspek legalitas lahan, keamanan dari banjir, ketersediaan air bersih, akses listrik (bekerja sama dengan PLN), dan akses jalan yang memadai.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial juga telah menyiapkan SOP perawatan fasilitas sekolah, dengan pendanaan dari APBN, termasuk gaji kepala sekolah, wali asrama, koki, dan petugas kebersihan. Konsep bangunan mengusung *green building*, memanfaatkan sirkulasi udara alami dan hemat energi dengan

menggunakan kipas angin sebagai pengganti AC.

Terkait pendanaan dan tahapan pembangunan, Essy mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat berlangsung dalam tiga fase, dengan total anggaran di bawah 1 triliun.

“Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat dari tahun 2025 sampai 2026 ada tiga fase, yang pertama ada di 327 miliar, yang kedua 280 miliar, dan yang ketiga dibawah 1 triliun. Untuk pembangunan di satu lokasi itu 200 miliar. Semuanya tergantung luas dan kondisi tanahnya,” terang Essy.

HARAPAN DAN DAMPAK SOSIAL

Walaupun dampak jangka panjang belum terlihat karena pembangunan baru dimulai pada 14 Juli 2025, tanda-tanda perubahan positif mulai terasa di beberapa lokasi awal seperti Sekolah Rakyat Handayani, yang berkonsep asrama (*boarding school*) di Jakarta. Anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah kini mendapatkan lingkungan belajar yang layak.

Program ini bahkan sudah mulai menyentuh hati masyarakat, seperti di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Essy menceritakan, banyak anak yang sebelumnya tidur beralaskan tikar di rumah kini memiliki ranjang pribadi.

“Orang-orang yang dipilih itu berasal dari rumah yang isinya terdiri dari beberapa keluarga yang tidurnya di tikar. Mereka sangat *excited* ketika mendapatkan fasilitas belajar berupa ranjang tidur, meja belajar, bahkan WC duduk. Di Mataram ada orang tua yang membawa tikar karena mengira anaknya akan tidur di ubin beralaskan tikar,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

“Ada anak yang tinggal bersama neneknya karena orang tuanya bercerai dan tidak diketahui keberadaannya. Sekarang, ia bisa belajar dan bermain tanpa khawatir soal tempat tinggal dan makan. Kami ingin memastikan anak-

anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan fasilitas yang sama baiknya seperti anak-anak lain. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk putus sekolah atau hidup di jalanan,” lanjut Essy.

Essy menekankan pentingnya dukungan generasi muda terhadap program ini, khususnya melalui inovasi teknologi.

“Generasi muda adalah pemimpin masa depan. Mereka bisa membantu dengan ide-ide kreatif berbasis digital untuk membuat pembangunan lebih efisien, hemat, dan canggih,” ujarnya.

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan teknologi, dan semangat Merdeka Belajar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pondasi menuju “Indonesia Emas” 2045, di mana pendidikan berkualitas menjadi hak setiap anak, tanpa terkecuali. ■



■ Meninjau Program Sekolah Rakyat





■ Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025

Latsar CPNS Lahirkan ASN Tangguh dan Berintegritas

TUJUAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS) ANTARA LAIN MEMBENTUK KARAKTER DAN INTEGRITAS MORAL MELALUI INTERNALISASI NILAI-NILAI DASAR ASN YANG DIRANGKUM DALAM PRINSIP BERAKHLAK (BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF).

TIM REDAKSI

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan pelatihan wajib bagi CPNS dan menjadi salah satu syarat utama pengangkatan menjadi PNS atau aparatur sipil negara (ASN), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 17 Tahun 2020. Di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

melaksanakan latsar CPNS secara terintegrasi melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM PU, Drs. Rudy Ridwan Effendi, M.T., menegaskan bahwa tujuan latsar CPNS adalah membentuk ASN PU yang profesional, tangguh, dan berkarakter, dengan kemampuan sikap perilaku seperti integritas, nasionalisme, dan kompetensi teknis sesuai jabatan dan bidang tugas yang diemban.

“Latsar CPNS pada dasarnya bertujuan untuk membekali para CPNS yang baru direkrut dan belum sepenuhnya memahami lingkungan kerja tempat mereka akan berkarier selama puluhan tahun ke

depan dengan pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang dibutuhkan untuk menjadi ASN yang profesional. Latsar ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pondasi penting bagi pembentukan karakter dan kompetensi ASN. Peserta dilatih agar siap mengabdikan kepada negara dan masyarakat dengan menjunjung integritas,” terang Rudy saat diwawancarai tim redaksi Parampara di kantornya, Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan.

Secara lebih rinci, Rudy memaparkan tujuan Latsar antara lain membentuk karakter dan integritas moral melalui internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dirangkum dalam prinsip BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Meningkatkan kompetensi teknis sesuai jabatan fungsional yang dimiliki, sehingga peserta mampu melaksanakan tugas dengan baik di bidangnya masing-masing. Mengembangkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan, termasuk kemampuan bekerja sama dalam tim, membangun kelompok kerja yang solid, serta memimpin secara efektif. Menanamkan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga mengubah pola pikir (*mindset*) dari individu menjadi pelayan publik.

“Dengan demikian, Latsar CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum bukan hanya memenuhi kewajiban aturan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk



■ Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025



■ Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 2025 (Latsar CPNS 2025) secara daring

mencetak ASN yang berintegritas, kompeten, nasionalis, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Rudy menjelaskan, pelaksanaan Latsar CPNS dilakukan selama 71 hari. Tahap pertama adalah pelatihan dan pembelajaran mandiri selama 9 hari, dengan pengampu dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Begitu para CPNS masuk, mereka secara resmi dideklarasikan sebagai peserta Latsar. Peserta mempelajari materi dari LAN melalui aplikasi Swajar yang mencakup karakter, sikap, perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, serta dukungan terhadap *smart government*. Dari KPK, peserta mengikuti Pelatihan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI). Dalam pelatihan ini,

CPNS diajarkan pemahaman mendalam tentang apa itu korupsi, mengapa harus diberantas, hingga merancang strategi dan aksi pencegahannya,” ucapnya.

Tahap kedua adalah *distance learning* selama 31 hari, yang dilakukan secara daring dari tempat kerja masing-masing. Pengajar yang kompeten di bidangnya menyampaikan materi secara tatap muka virtual.

Tahap ketiga adalah habituasi selama 30 hari. Habituasi juga menjadi bentuk simulasi penerapan nilai-nilai ASN yang sebelumnya dipelajari, langsung di lingkungan kerja. Dalam tahap ini, peserta menyusun rancangan aktualisasi berdasarkan hasil pembelajaran mandiri dan *distance learning*. Mereka mengamati kondisi di tempat kerja, mengidentifikasi permasalahan, lalu mengusulkan perbaikan, misalnya penyusunan SOP atau langkah lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Selama 71 hari, rangkaian Latsar ini memberi waktu yang cukup bagi para CPNS untuk memahami lingkungan kerja, menginternalisasi nilai-nilai ASN, serta melahirkan gagasan perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di instansi masing-masing,” terangnya.

Saat ditanya bagaimana menyampaikan pesan kepada peserta Latsar tentang pentingnya integritas, Rudy menjelaskan berdasarkan pengalamannya di berbagai jabatan selain Kapusbangkom. Menurutnya, penyampaian materi integritas seharusnya memiliki kekhasan tersendiri. Jika ingin efektif, diperlukan pendekatan-pendekatan khusus, bukan sekadar formalitas atau layanan yang bersifat *link service*.

“Saya memang belum pernah terlibat langsung, tapi dari yang pernah saya lihat, misalnya pada PADI, penyampaian materi dilakukan melalui kisah nyata dan contoh kasus, bukan hanya definisi. Salah satu contohnya adalah kisah PNS yang menolak suap dan berhasil menyelamatkan proyek penting. Dalam cerita tersebut, meskipun ada upaya suap dalam sebuah proyek besar, PNS tersebut tetap menolak dan menjaga integritasnya,” kisahnya.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah menghubungkan integritas dengan *Core Values* BerAKHLAK. Misalnya, nilai akuntabel tidak akan terwujud tanpa integritas. Orientasi pada pelayanan publik juga tidak akan optimal jika individunya tidak berintegritas. Begitu pula dengan loyalitas, yang merupakan kesetiaan kepada negara dan bangsa, sifat yang tidak dapat dinegosiasikan.

“Yang penting bukan hanya membahas integritas di Latsar, tetapi memastikan bagaimana nilai tersebut diimplementasikan di lingkungan kerja. Pemimpin atau atasan, bahkan sesama pegawai, harus menjadi *role model* atau panutan dalam penerapan integritas. Itulah pandangan saya berdasarkan pengalaman, meskipun saya belum pernah terlibat langsung sebagai pengajar,” ucapnya.

TANTANGAN LATSAR CPNS

Dari tahun ke tahun, BPSDM Kementerian PU telah mengevaluasi jalannya kegiatan Latsar CPNS termasuk tantangan yang dihadapi sehingga dapat mengidentifikasinya. Diantaranya yakni keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun sudah lama dibahas, isu keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala.

“Fasilitas kami sebenarnya sudah cukup memadai, terutama untuk pelatihan klasikal (tatap muka), mulai dari asrama, ruang kelas, hingga sarana pendukung lainnya, yang tersedia dari Medan hingga Papua. Namun, masalah muncul saat jumlah peserta sangat besar. Pada tahun ini, peserta Latsar mencapai 2.427 orang. Sesuai aturan LAN, satu kelas maksimal berisi 40 orang. Jika aturan itu diterapkan, pelatihan baru akan selesai bahkan hingga tahun 2026. Karena itu, kami mengajukan diskresi kepada LAN, dan akhirnya diizinkan membuat kelas

berisi 70 orang khusus untuk Kementerian PU di tahun ini, dengan catatan kualitas tetap terjaga,” katanya seraya menyebut pelaksanaan secara daring menjadi solusi, tetapi menimbulkan tantangan baru, terutama perbedaan kualitas koneksi internet dan fasilitas di tiap daerah.

Rudy juga menyebut kebosanan menjadi tantangan yang harus dihadapi peserta Latsar yang mengikuti pelatihan daring dari pagi hingga sore. “Bagi sebagian orang, menjaga fokus selama pembelajaran daring cukup berat. Kebosanan menjadi salah satu musuh terbesar dalam proses belajar. Selain itu, dibutuhkan kesiapan fisik dan mental agar mereka mampu bertahan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan,” katanya.

Tantangan lain yang dihadapi setelah Latsar adalah godaan pelanggaran integritas pasca pelatihan di lingkungan kerja. “Dalam seleksi CPNS di Kementerian PU, kami menambahkan tes psikologi yang mengukur potensi integritas, di luar tes yang diwajibkan Kementerian PAN-

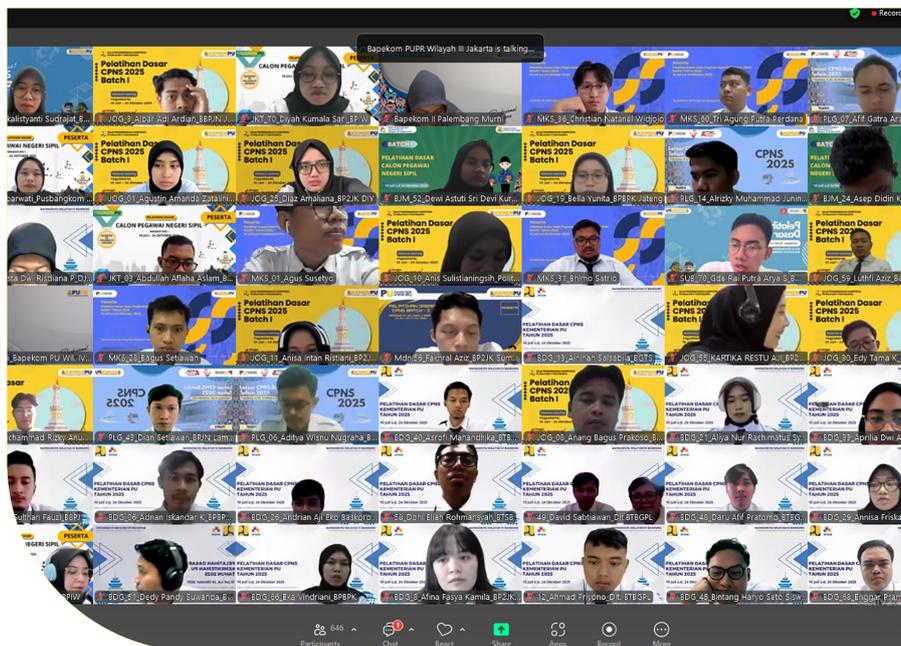
RB. Dari skala lima, kami hanya meloloskan peserta dengan nilai rata-rata minimal berada pada angka empat. Langkah ini diambil untuk memastikan para CPNS yang masuk memiliki potensi integritas yang tinggi sejak awal. Namun, godaan terbesar muncul ketika mereka memasuki lingkungan kerja yang tidak sepenuhnya steril. Misalnya, ketika baru bergabung, mereka mendengar isu penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sana-sini. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa tindakan koruptif merupakan hal biasa di lingkungan PNS. Akibatnya, mereka bisa kehilangan semangat untuk menjalankan nilai integritas yang sudah ditanamkan sejak awal. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa saya harus menjalankan integritas, jika kondisinya seperti ini. Inilah tantangan terbesarnya,” katanya.

Selain itu, tantangan lain berkaitan dengan birokrasi masa kini yang serba digital. Sebenarnya, bagi generasi muda, hal ini bukanlah kendala berarti karena mereka adalah generasi digital yang cepat beradaptasi. Tantangannya justru muncul ketika harus menyesuaikan diri dengan rekan kerja dari generasi yang lebih tua, seperti generasi X atau bahkan *baby boomers*, yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi terkini.

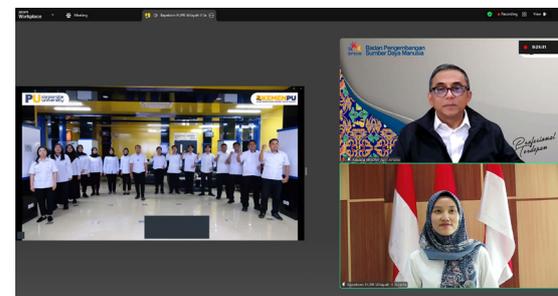
“Ada teman-teman yang mampu memahami aplikasi dengan cepat, tetapi rekan yang lebih senior membutuhkan waktu dan bimbingan. Alhasil, generasi muda ini harus mengajarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dapat berjalan lancar. Jadi, tantangannya adalah kemampuan menyelaraskan ritme kerja lintas generasi,” terangnya lagi.

Di akhir wawancara, tak lupa Rudy menyampaikan pesan dan harapannya untuk peserta Latsar.

“Ikuti seluruh prosesnya dengan baik. Saat belajar, nikmatilah proses tersebut dan jangan mengeluh. Hasilnya akan terasa setelah teman-teman menjalani semua tahapan dengan lancar, tanpa keluh kesah, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya, apa yang disampaikan oleh para fasilitator harus dijalankan dengan sepenuh hati. Jika dilakukan dengan sepenuh hati, saya yakin hasilnya akan maksimal,” pungkasnya. ■



■ Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) secara daring





MANUSIA MERDEKA: Refleksi Keberpikakan Djanbi, Pendiri Pasukan Elit TNI AD

"MANUSIA TIDAK
LAIN ADALAH
APA YANG
IA PERBUAT
TERHADAP
DIRINYA SENDIRI."

(JEAN-PAUL SARTRE).



**Dr. Doedoeng Zenal
Arifin, S.T., M.T.**

Kepala Pusat
Pengembangan
Kompetensi Sumber
Daya Air, Cipta Karya,
dan Prasarana Strategis



■ Mochammad Idjon Djanbi

Ada yang lebih abadi daripada debu dan darah di medan perang. Dalam kisah perjuangan perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949), sebuah keputusan diambil, sunyi tapi bergema hingga kini. Keputusan seorang prajurit untuk menjadi manusia merdeka merupakan sebuah pelajaran berharga. Mochammad Idjon Djanbi (Rokus Bernardus Visser) bukan sekadar nama biasa, melainkan perwujudan keberanian eksistensial, sebuah tindakan melepaskan diri dari kepatuhan terhadap kekuasaan dan menyelami kedalaman nurani.

Visser awalnya adalah alat dari struktur kekuasaan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Ia dikirim untuk menghadang perjuangan prajurit Indonesia dan mengembalikan Indonesia ke dalam penjajahan Kerajaan Belanda. Ia adalah prajurit sistem, bagian dari arus besar pemenang Perang Dunia II yang diarahkan oleh kekuasaan Belanda. Tapi justru di tengah pertempuran itu, tanpa jaminan kemenangan atau pujian, Visser berbelok dari barisan. Ia memutuskan untuk berpikah pada kebenaran yang sepi, bukan pada kekuasaan yang ramai. Ia tidak mendapatkan janji

dunia atau surga, bahkan nyawanya terancam kematian. Namun dari sinilah keberadaan sejati dimulai.

Jean-Paul Sartre mengajarkan bahwa keberadaan mendahului esensi. Manusia tidak dilahirkan dengan takdir tertentu, melainkan membentuk dirinya sendiri melalui pilihan. Tidak ada hakikat manusia sebelum ia memutuskan menjadi sesuatu melalui tindakannya. Visser tidak dilahirkan sebagai pahlawan, Bapak Kopassus Indonesia. Ia menciptakan dirinya sebagai manusia yang merdeka dalam momen itu, di persimpangan karier dan hidup mati. Dalam setiap langkahnya menuju medan perang, ia sedang membangun esensinya sendiri. Melalui kehendak bebas, kecintaannya terhadap Indonesia berpadu dengan rasa bersalah terhadap tanah jajahan, dan keberanian untuk bertanggung jawab.

Perang kemerdekaan Indonesia bukan sekadar panggung sejarah, tetapi juga panggung etika. Sebab di sana, tindakan tidak dilahirkan dari kalkulasi politis atau teologis semata, melainkan dari kegelisahan manusia. Visser tidak menunggu bisikan wahyu. Ia hanya mendengar keraguan dalam dirinya. Dalam dunia yang dikaburkan oleh retorika dan kekuasaan, keraguannya kemudian menjelma menjadi cahaya. Dari keraguan itu, Visser menyeberang. Ia melepaskan identitas militer Belanda, kehormatan duniawi, dan keselamatan keluarga demi mengikatkan diri pada sesuatu yang lebih tinggi, bukan pangkat dan jabatan, tetapi suara hati yang dibalut kebenaran yang sunyi.

Dalam tradisi militer, kisah Visser yang bermetamorfosis menjadi Idjon Djanbi, bukan sekadar tokoh melainkan 'arketipe'. Setiap tokoh dalam peristiwa itu memuat potensi reflektif. Djanbi menjadi lambang bahwa setiap manusia bisa berpaling dari penindas menjadi pembela yang tertindas, bahkan di detik terakhir. Ia tidak dilahirkan di pihak kebenaran, tapi memilih untuk masuk ke dalamnya. Ia adalah simbol keterbukaan eksistensi, bahwa tidak ada identitas yang final selama masih ada kehendak untuk berubah.

Pikiran ini sangat selaras dengan etika eksistensial Sartre, yang menyatakan bahwa setiap tindakan manusia adalah pernyataan universal. Dengan memilih dirinya sendiri, manusia secara bersamaan memilih jenis kemanusiaan yang ia anggap layak dijalani. Maka keputusan Djanbi bukan hanya keputusan pribadi, tapi pernyataan bahwa manusia tidak dikutuk untuk setia pada masa lalu. Ia bisa memutus rantai determinisme dan berdiri di sisi yang ia pilih sendiri. Tentu, ini bukan tanpa kecemasan. Sartre menyebutnya "rasa cemas ontologis" – karena kebebasan selalu menakutkan. Djanbi merasakannya dalam bentuk paling konkret: melawan Kerajaan Belanda yang pernah ia layani, demi membela nagara baru yang dapat kalah secara militer, tapi menang secara makna.

Kebebasan, dalam makna ini, bukan hanya soal memilih, tapi soal bertanggung jawab atas pilihan itu, bahkan ketika dunia tak berpihak. Tidak ada momen yang lebih mengerikan untuk membuat keputusan moral selain dalam peperangan. Dan justru di momen seperti itulah makna manusia menjadi terang. Sebab tidak ada keuntungan, tidak ada sorak, tidak ada jaminan keselamatan. Hanya kemurnian kehendak, yang memisahkan manusia dari benda.

Djanbi tak hanya mengubah sisi dalam perang, ia mengubah sisi dalam dirinya. Ia keluar dari struktur kekuasaan dan masuk ke dalam struktur nurani. Ia bukan lagi perpanjangan dari kekuasaan negara, melainkan gema dari hati yang bersih. Dalam bahasa Sartre, ia telah menjadi "proyek" yang menciptakan nilai dalam dunia. Ia tidak menunggu nilai itu diimpor dari luar, tidak membungkus keputusannya dengan ayat atau dogma. Ia bertindak, dan dengan tindakan itu, ia menciptakan dirinya.

Ada satu bagian penting dari refleksi Sartre yang menjelaskan dengan sempurna posisi Djanbi. Ketika ditanya bagaimana seseorang bisa membuat pilihan moral tanpa panduan yang pasti? Sartre menjawab, manusia adalah satu-satunya makhluk yang saat memilih, ia memilih bagi seluruh umat manusia. Djanbi memilih untuk menolak perintah, meski sistem telah menulis perannya. Dan dalam penolakan itu, ia menulis ulang sejarah. Ia menjadi tanda bahwa takdir bukan garis lurus, tetapi ruang kosong yang menanti keberanian.

Apa yang membuat Djanbi begitu menggugah adalah kesendiriannya. Ia tidak diiringi rombongan pasukan. Ia tidak menunggu dukungan. Ia datang sendirian, menundukkan kepalanya di hadapan negara yang sebelumnya ia perangi, dan memohon agar diterima. Tapi bahkan tanpa permohonan itu, ia sudah diterima— oleh sejarah, oleh makna, oleh keberadaan.

Kini, dalam dunia yang terus-menerus menekan manusia untuk patuh, untuk diam, mengalir bersama sistem, cerita Djanbi adalah napas dalam gelap. Ia mengingatkan bahwa menjadi manusia berarti terus-menerus berada di ambang. Tidak ada yang final dalam hidup, selama kita masih bisa memilih. Dan pilihan itu, walau kecil, walau menyakitkan, adalah sumber segala kemuliaan.

Peperangan memberi kita bukan hanya kisah kepahlawanan, tapi juga peta kesadaran. Ia memperlihatkan bahwa yang suci tidak selalu hadir sejak awal. Yang suci bisa lahir dari kegelapan, jika cahaya itu dicari dan diperjuangkan. Djanbi adalah saksi bahwa manusia bisa berubah bukan karena ia terpaksa, tapi karena ia ingin. Bukan karena diperintah, tapi karena ia mendengar dirinya sendiri.

Ketika dunia modern membungkus manusia dalam kenyamanan palsu dan loyalitas kosong, kita butuh Djanbi bukan sebagai figur sejarah, tapi sebagai gema dalam diri. Kita mungkin tidak berdiri di lapangan peperangan, tapi kita berdiri di antara banyak pilihan. Kita mungkin tidak menjadi pasukan komando menunggang tank baja, tapi kita menunggang opini dan rasa takut. Kita mungkin tidak memegang senapan, tapi kita memegang Keputusan, dan dari sanalah eksistensi kita dilahirkan.

Djanbi tidak menunggu masa depan untuk membenarkan pilihannya. Ia memilih karena nuraninya tak bisa lagi dibungkam. Dalam momen itu, ia tidak hanya hidup, ia menjadi hidup. Dan dari keberaniannya, kita belajar bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah tapi luka. Bukan keamanan tapi kecemasan, dan bukan kepastian tapi makna. Maka siapa pun yang hari ini berdiri di persimpangan, ingatlah bahwa manusia tidak lain adalah apa yang ia perbuat terhadap dirinya sendiri. Dan mungkin, dari keputusan yang sunyi itu, kita akan menemukan kembali makna menjadi manusia. ■



SESUAI DENGAN CITA-CITA DAN ARAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO DIHARAPKAN INDONESIA SUDAH MAMPU SWASEMBADA DAN BISA EKSPOR HASIL PANGAN PADA TAHUN 2029 MENDATANG.

TIM REDAKSI



■ Pembekalan Karyasiswa Program MSS Teknik Angkatan VI Tahun 2025

Buka 2 Program Studi Baru, Magister Super Spesialis Kementerian PU Siap Dukung Kedaulatan Pangan Nasional

Pemerintah Indonesia tengah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka menjamin kedaulatan pangan nasional. Pasalnya saat ini dunia tengah mengalami krisis pangan. Program Pangan Dunia atau *World Food Programme* (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78

negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Karena itu program kedaulatan pangan nasional harus segera dimulai sesegara mungkin.

Sejatinya kedaulatan pangan dapat didefinisikan sebagai hak sebuah negara dalam membuat kebijakan pangan secara mandiri. Kebijakan ini dibuat untuk

menjamin hak rakyat atas ketersediaan pangan nasional. Dan jika dimungkinkan pada tahun 2029 mendatang Indonesia sudah bisa swasembada dan ekspor bahan pangan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mendukung program kedaulatan pangan nasional sesuai dengan cita-cita pemerintah, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu pilar dari program Asta Cita. BPSDM Kementerian PU berupaya mempersiapkan dua program studi baru yakni Program Studi Rekayasa Teknologi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Program Studi Rekayasa Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Doedoeng Zenal Arifin mengatakan upaya BPSDM PU membuka dua program studi baru ini dilakukan untuk memastikan munculnya generasi muda yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi, kemampuan manajerial dalam meregulasi aturan-aturan yang ada agar mampu memberikan ekosistem dan iklim yang kondusif di bidang ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung kedaulatan pangan harus disiapkan sedini mungkin. Pasalnya sesuai dengan cita-cita dan arahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan Indonesia sudah mampu swasembada dan bisa ekspor hasil pangan pada tahun 2029 mendatang. Selain mempersiapkan SDM terampil untuk mendukung ketahanan pangan, BPSDM Kementerian PU juga bersiap menghadirkan



■ Magang Karyasiswa Program MSS



solusi untuk kedaulatan air termasuk juga kedaulatan energi. Sebab sebagai negeri yang "gemah ripah loh jinawi" Indonesia dikaruniai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah mulai dari air, energi hingga alam yang sungguh indah.

"Alasan mengapa kita membuka 2 program studi baru dalam bentuk Magister Super Spesialis (MSS) karena permintaannya bukan berdasarkan keinginan mahasiswa (karyasiswa) bukan keinginan Kepala Pusatnya, yaitu saya, bukan keinginan Kepala BPSDM bahkan bukan keinginan Pak Menteri PU. Tapi keinginan Presiden untuk mendukung program kedaulatan pangan. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa para alumninya akan menjadi kader terbaik di Indonesia dalam mengelola, meregulasi aturan-aturan yang ada saat ini. Sehingga mampu memberikan ekosistem dan iklim yang kondusif dalam mendukung program pemerintah kedaulatan pangan," ungkap Doedoeng Zenal Arifin dalam bincang santai dengan redaksi Parampara.

PROGRAM STUDI BARU

BPSDM Kementerian PU dalam mendukung program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan dua program studi baru yakni, Program Studi Rekayasa Teknologi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Program Studi Rekayasa Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Kedua program ini dirancang untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan memiliki SDM mumpuni dalam bidang teknologi, serta memiliki kemampuan menyusun regulasi untuk menciptakan ekosistem dan membuat iklim yang kondusif dalam bidang kedaulatan pangan.

"Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa para alumninya akan menjadi kader terbaik di Indonesia dalam mengelola, meregulasi aturan-aturan yang ada saat ini, sehingga memberikan ekosistem dan iklim yang kondusif dalam mendukung program kedaulatan pangan. Kita kalau sesuai harapan presiden, pada tahun 2029 sudah ekspor bahan pangan. Kita juga ingin mendorong kebutuhan air minum dan sanitasi yang sesuai standar internasional. Kalau kita lihat di hotel-hotel besar air mineral yang disajikan itu merk-merk luar dari Perancis, dari Swiss. Mengapa kita tidak bisa menghasilkan air mineral yang kualitasnya memenuhi standar internasional? Program ini kita dorong untuk memenuhi kebutuhan dan standar dari air minum dan sanitasi," papar Doedoeng.

Doedoeng menambahkan sesuai amanat konstitusi. Di mana Bumi, air dan SDA itu diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Ia berharap kedepan alumni MSS khususnya dua

program studi baru yakni Program Studi Rekayasa Teknologi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Program Studi Rekayasa Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi *output*-nya dapat menghasilkan kader-kader ASN muda yang memiliki kualifikasi akademik serta mumpuni dalam penguasaan teknologi dan mampu berkontribusi secara nyata dalam penerapan program kedaulatan pangan nasional.

"Kita harapkan mahasiswa kita yang menempuh program MSS ini, nantinya mampu merancang teknologi pengelolaan WTP dan IPAL, IPLT lalu kita punya SPAL yang itu kita yakin dengan kemampuan akademik dan teknologi yang baik kita bisa mandiri. Mereka menjadi kader dan wangi yang *qualified* dan berkontribusi di berbagai event pertemuan ilmiah di tingkat internasional," tambahnya.

PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM MSS

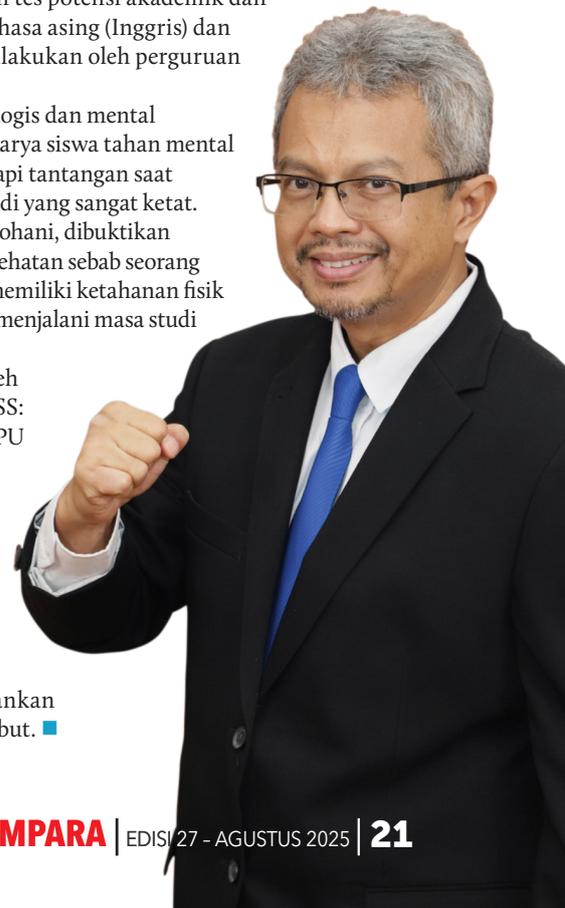
Program MSS dirancang dengan kurikulum *tailor made* yang bermuatan teknis dan terapan sesuai kebutuhan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini memiliki porsi praktek lebih besar dengan durasi pembelajaran maksimal selama 18 (delapan belas) bulan.

Bagi calon mahasiswa yang berminat untuk mengikuti dua program studi yakni Program Studi Rekayasa Teknologi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Program Studi Rekayasa Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Doedoeng berkenan berbagi sejumlah informasi penting terkait persyaratan menjadi karyasiswa program MSS. Adapun persyaratannya meliputi:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PU dengan masa kerja minimum 1 (satu).
2. Batas usia maksimal 3 kali waktu normatif program studi (1,5) tahun sebelum batas usia pensiun.
3. Kemampuan akademik, kemampuan kognitif dibuktikan dengan penguasaan tes potensi akademik dan kemampuan berbahasa asing (Inggris) dan lulus uji tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi mitra.
4. Kemampuan psikologis dan mental diharapkan calon karya siswa tahan mental dan kuat menghadapi tantangan saat menjalani masa studi yang sangat ketat.
5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan kontrak kesehatan sebab seorang karya siswa harus memiliki ketahanan fisik yang prima selama menjalani masa studi

Siapa saja yang boleh mengikuti program MSS:

1. PNS Kementerian PU
2. PNS Kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Nasional dengan catatan pembiayaan dibebankan pada instansi tersebut. ■





Mendorong Kepemimpinan Perempuan di Sektor Infrastruktur: Kiprah Program PAVE di Kementerian PU

INISIASI PAVE DI KEMENTERIAN PU BERANGKAT DARI TUJUAN BESAR KIAT UNTUK Mendukung Pembangunan Infrastruktur yang lebih inklusif.

TIM REDAKSI

Di balik pembangunan infrastruktur yang kerap didominasi figur laki-laki, ada gerakan senyap namun berpengaruh yang tengah mendorong kesetaraan di level kepemimpinan. Gerakan itu didukung melalui program *Promoting Advancement of Women*

in *Indonesia's Infrastructure Sector (PAVE)*, sebuah inisiatif yang lahir dari kerja sama antara Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan Kementerian PU.

Dyana Savina Hutadajulu, MA, *Team Leader* PAVE di KIAT, adalah salah satu motor penggeraknya. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Redaksi *Parampara*, ia membagikan kisah inspirasi, tantangan, serta strategi yang dijalankan untuk membuka jalan lebih lebar bagi kepemimpinan perempuan di sektor infrastruktur yang selama ini dianggap maskulin.

"Dalam pengalaman saya bekerja di berbagai program yang berfokus pada isu GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*), saya sering bertemu dengan banyak perempuan

inspirasi. Namun yang paling menginspirasi datang dari Ibu Nurlina, seorang nelayan tangguh di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Pada tahun 2016, saya terlibat dalam sebuah program pemberdayaan perempuan yang berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput," katanya.

Program tersebut bertujuan mendorong lahirnya pemimpin perempuan lokal yang dapat mengadvokasi hak-hak perempuan, serta mendorong kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada akses layanan bagi Perempuan. Bagi wanita yang akrab disapa Savina ini, semangat kepemimpinan perempuan tidak selalu lahir dari panggung besar atau kantor pusat megah, seperti Ibu Nurlina yang menginspirasi.

Di wilayah kepulauan yang akses transportasi lautnya terbatas dan mahal, Nurlina memanfaatkan perahunya untuk mengantar warga, khususnya perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan, dan anak-anak perempuan yang harus menyeberangi laut demi bersekolah. Di sela aktivitas

melaut, Nurlina juga memperbaiki jaring dan mengikat rumput laut untuk tambahan penghasilan, sekaligus terus melayani komunitasnya

"Profesi nelayan kerap dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, tetapi Ibu Nurlina membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjalaninya dengan tangguh dan penuh makna. Bagi saya, kepemimpinan Ibu Nurlina adalah contoh nyata bahwa kekuatan dan perubahan dapat lahir dari keberanian dan kepedulian pada sesama, dan menembus batas serta stereotip peran gender yang ada. Kepemimpinannya yang tanggap, adaptif dan autentik dalam menjalani peran dengan mandiri, menjadi sumber inspirasi yang patut dicontoh," ujar Savina.

MENGHADAPI BIAS GENDER

Savina tidak menutupi bahwa dirinya pernah berhadapan langsung dengan bias gender dan stereotip, terutama di awal perjalanan profesionalnya. Saat bekerja di program yang mayoritas diisi laki-laki senior, ia kerap melihat, beberapa perempuan yang tidak dilibatkan dalam diskusi strategis dan hanya diberi tugas non-strategis, walaupun peran mereka - termasuk Savina sendiri, seharusnya merupakan bagian dari tim inti yang bertanggung jawab terhadap arah strategis program.

Respon sang atasan membuka mata. Bukan sekadar memberi ruang, percakapan itu juga mengungkap adanya kesenjangan generasi, perbedaan latar belakang, dan budaya kerja yang perlu diubah.

"Diskusi tersebut menjadi momen reflektif yang tidak hanya memperluas pemahaman saya mengenai dinamika tempat kerja, tetapi juga

memberikan masukan penting bagi pimpinan terkait kebutuhan akan perubahan budaya kerja (*culture shift*). Pengalaman ini mengajarkan bahwa kemampuan untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif merupakan kunci dalam menciptakan ruang kontribusi yang setara, sekaligus dalam hal ini, dapat mengubah cara pandang terhadap perempuan muda di lingkungan kerja,” urai wanita lulusan FISIP UI tersebut.

TANTANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI SEKTOR INFRASTRUKTUR

Hasil studi *Women's Leadership in Infrastructure Sector* (WLIS) yang dilakukan oleh KIAT tahun 2023 dan diskusi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan di Januari 2024 memperlihatkan bahwa hambatan perempuan untuk memimpin di sektor infrastruktur seringkali bukan berupa larangan langsung, melainkan kebutuhan penguatan di berbagai aspek.

Studi dan diskusi dari studi tersebut mengungkapkan empat hal yang perlu dibenahi. *Pertama*, pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

Kedua, perlunya peningkatan kepercayaan diri dan kapasitas kepemimpinan, khususnya dalam hal navigasi karier, pengambilan keputusan, serta membangun jejaring profesional.

Ketiga, perlunya strategi pengembangan karier yang lebih terarah dan akses yang adil terhadap peluang, termasuk ketersediaan kebijakan yang mendukung perempuan untuk berkarier secara optimal.

Selain ketiga hal tersebut, dukungan dari kolega dan pimpinan laki-laki juga menjadi elemen penting dalam menciptakan tempat kerja yang setara dan inklusif. Peran mereka dapat memperkuat dukungan terciptanya budaya kerja yang mempromosikan kemajuan perempuan.

“Dengan memperkuat keempat aspek tersebut, perempuan akan lebih siap dan percaya diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin di sektor infrastruktur, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan sektor ini secara keseluruhan,” tegasnya.

HADIRNYA PAVE DI KEMENTERIAN PU

Inisiasi PAVE di Kementerian PU berangkat dari tujuan besar KIAT untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif. Kementerian PU, dengan peran strategisnya, menjadi mitra utama kegiatan PAVE dalam menjalankan program ini, bersamaan dengan Srikandi BUMN yang menghubungkan PAVE dengan *women leaders* dari BUMN Infrastruktur.

“Peran utama PAVE adalah sebagai penyedia asistensi teknis melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan modul, kegiatan jaringan profesional, dialog, serta konsultasi kebijakan untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong kepemimpinan perempuan di sektor infrastruktur,” jelas Savina.

Kerja sama difokuskan melalui BPSDM PU dan diformalisasi lewat Surat Kerja Sama yang menetapkan tiga area prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan inovasi dan kolaborasi untuk kepemimpinan perempuan di sektor infrastruktur.
2. Dukungan dan kesempatan setara dalam pengembangan karier bagi perempuan dan laki-laki.
3. Peningkatan representasi dan peran perempuan dalam perumusan regulasi dan kebijakan.

Ketiga prioritas ini selaras dengan dua komponen utama PAVE yakni: Pengembangan kapasitas dan penguatan jaringan profesional perempuan

di sektor infrastruktur dan Penguatan kebijakan, program, dan praktik tempat kerja yang lebih inklusif.

PROGRAM DAN RANGKAIAN KEGIATAN 2025

Sejak Maret 2025, PAVE telah menggelar rangkaian kegiatan bersama PAVE *Women Leaders* di Kementerian PU dan BUMN Infrastruktur.

“Kegiatan diawali dengan *Activity Planning Workshop*, sebagai forum pendahuluan untuk memetakan kebutuhan dan isu prioritas kepemimpinan perempuan. Selanjutnya dilakukan *Pre-Training* dan *Validation Workshop* yang bertujuan menghubungkan kembali para pemimpin perempuan dengan *insight* yang telah diidentifikasi, sekaligus menjadi tahap persiapan menuju pelatihan inti. Berdasarkan hasil dari fase ini, dikembangkanlah modul pelatihan yang kontekstual dan relevan dengan pengalaman serta tantangan yang dihadapi para peserta,” urainya.

Selain itu digelar kegiatan *PAVE Women Leadership Training* pada awal Juni 2025 dan dilanjutkan dengan kegiatan konsultasi pertama untuk pengembangan rencana aksi (*Action Plan Check-in*) pada 9 Juli 2025. PAVE juga telah memulai Dialog Penguatan Kebijakan Tempat Kerja bersama BPSDM PU pada 8 Mei 2025, yang akan berlanjut dengan tiga sesi konsultasi kebijakan.

“Ke depan, PAVE akan memfasilitasi dua sesi konsultasi pengembangan rencana aksi (*action plan check-ins*) lanjutan dengan PAVE *women leaders* dari Kementerian PU untuk memperkuat rencana aksi dan menjembatani isu-isu prioritas tersebut dengan asistensi kebijakan yang akan difasilitasi oleh BPSDM PU. Rangkaian ini akan dilanjutkan dengan tiga kegiatan konsultasi kebijakan bersama BPSDM, yang dirancang sebagai ruang asistensi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di Kementerian PU,” ungkap wanita yang menempuh studi S2 di Erasmus University Rotterdam, Belanda tersebut.

Selain itu, PAVE juga mengembangkan kegiatan penguatan keterhubungan dan eksposur para *women leaders* melalui kegiatan *Industry Exchange*, yang menghubungkan pemimpin perempuan sektor infrastruktur dengan para ahli dari Indonesia dan Australia.

MENUJU BUDAYA KERJA INKLUSIF

Bagi Savina, keberhasilan PAVE tidak hanya diukur dari pelaksanaan pelatihan dan penyusunan modul semata, tetapi juga dari lahirnya aksi nyata dan perubahan positif yang terinspirasi dari pembelajaran melalui pelatihan, modul, serta dialog yang difasilitasi dalam berbagai kegiatan PAVE. Perubahan ini akan membuat perempuan bukan sekadar hadir di

meja pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif memimpin arah pembangunan.

“PAVE adalah perjalanan panjang. Ini bukan sekadar program, tapi investasi sosial yang hasilnya akan kita rasakan dalam peningkatan kualitas infrastruktur yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” tutup Savina. ■





■ Ir. Widiarto, Sp.I., (Ketua Umum IPPU)



■ Silaturahmi Nasional Pensiunan PU Ex-NTB - Jakarta, 28 Juni 2025

Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU): Menjaga Asa, Merajut Silaturahmi, dan Menghidupkan Kompetensi Pensiunan PU

SEJARAH IPPU DIMULAI PADA 3 DESEMBER 1975, SAAT PERINGATAN HARI BAKTI PU. KALA ITU, PARA PENSIUNAN SEPAKAT MEMBENTUK WADAH PAGUYUBAN YANG DISEBUT KERUKUNAN PENSIUNAN PEKERJAAN UMUM (KPPU).

TIM REDAKSI

Saat masa pensiun tiba, banyak orang mungkin memilih untuk menikmati waktu di rumah dengan keluarga dan berhenti dari segala kontribusi seperti saat masih aktif bekerja. Namun, bagi Ir. Widiarto, Sp-I., pensiun sebagai ASN Kementerian PU bukanlah titik akhir dari kontribusi, melainkan gerbang menuju babak baru yang tak kalah penuh warna sebagai kelanjutan pengabdian. Perannya sebagai Ketua Umum Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) periode 2024-2029 menegaskan ikatan batin dengan insan PU terlalu kuat untuk dilepaskan begitu saja.

"IPPU ini rumah kedua bagi kami. Selama puluhan tahun, kami bekerja seperti keluarga. Saya ingin rumah ini tetap hangat, bermanfaat, dan mandiri," kata Ir. Widiarto, Sp-I., ketika tim redaksi Parampara menyambangi ruang kerjanya.

Widiarto yang pernah memegang amanah tertinggi di jajaran pengawasan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR menerangkan awal mula berdirinya IPPU yang lahir dari semangat Hari Bakti PU 1975.

"Sejarah IPPU dimulai pada 3 Desember 1975, saat peringatan Hari Bakti PU. Kala itu, para pensiunan sepakat membentuk wadah paguyuban yang disebut Kerukunan Pensiunan Pekerjaan Umum (KPPU). Keputusan ini kemudian mendapat legitimasi formal lewat Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1976. Tujuan awalnya sederhana namun penuh makna

yakni menjaga silaturahmi dan rasa persaudaraan yang telah terjalin selama puluhan tahun bekerja bersama," terang Widiarto yang pernah dipercaya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menurutnya, suasana kerja yang penuh kebersamaan di Kementerian PU menumbuhkan rasa kekeluargaan yang kuat, sehingga tidak bisa begitu saja hilang saat masa pensiun tiba.

"Sebagian besar dari kami mengabdikan dua pertiga hidup, bahkan hampir seumur hidup, untuk PU. Rata-rata masa kerja mereka di atas 30 tahun, bahkan ada yang mencapai 40 tahun. Dalam keseharian, mereka terbiasa bekerja bersama dari pagi hingga 12 jam, terutama di lapangan, sehingga terjalin

rasa kebersamaan layaknya satu keluarga. Ikatan yang sudah terjalin begitu lama inilah yang mendorong mereka untuk tetap menjaga hubungan dan menyambung silaturahmi setelah memasuki masa pensiun,” tutur Widiarto.

Pada awalnya, kegiatan IPPU terpusat di Jakarta, terutama di kawasan Pasar Jumat, Pejompongan, dan Bekasi. Namun, seiring waktu, organisasi ini berkembang pesat.

“Kepengurusan IPPU periode 2019-2024 berhasil membentuk 35 wilayah di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa ada di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur,” urainya.

Dijelaskan pula, keanggotaan IPPU bersifat otomatis. Begitu seorang pegawai PU pensiun, ia langsung menjadi anggota tanpa harus mendaftar. “Ini wadah sosial, wadah silaturahmi. Jadi tidak perlu proses rumit,” jelas Widiarto.

Namun, ia ingin sistem ini lebih modern. Untuk itu ia membangun integrasi data dengan biro kepegawaian agar setiap data pensiunan masuk otomatis ke *database* IPPU. “Sistem ini diharapkan memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan,” sambungnya.

Bagi Widiarto, manfaat IPPU bagi anggotanya sangat besar, meski bukan berupa materi langsung. *Pertama* adalah wadah kegembiraan.

“Kalau sudah pensiun lalu di rumah saja, bisa stres. Tapi jika ketemu teman, *ngobrol* masa lalu, itu hormon gembira bisa memperpanjang usia,” ujarnya.

Kedua, IPPU memperkuat ikatan persaudaraan kedua (selain keluarga kandung) yang terjalin dari puluhan tahun bekerja bersama.

Namun, tidak semua anggota berada dalam kondisi sejahtera. Dari sekitar 13 ribu

anggota, sekitar 7% tergolong prasejahtera. Data inilah yang mendorong IPPU mengadakan berbagai program sosial.

“Kita membagikan sembako atau uang saat peringatan Hari Bakti PU, Hari Korpri atau 17 Agustus. Pernah waktu membagikan sembako kepada pensiunan kita mengerahkan adik-adik generasi muda PNS baru. Perlu perjuangan untuk ketemu rumahnya, itu mereka nangis saat datang ke rumahnya dan melihat kondisi mereka. Di situ ada rasa solidaritas sebagai insan PU,” ungkapnya dengan liris.

Saat ini IPPU memiliki empat bidang kerja yang menjadi pilar utama, yaitu:

1. Organisasi dan Keanggotaan: Mengelola data pribadi, data kesejahteraan, dan kompetensi anggota. Data ini menjadi dasar bagi semua program IPPU.
 2. Pendayagunaan Anggota: Bidang ini berfokus memanfaatkan kompetensi luar biasa para pensiunan yang masih sehat dan berpengalaman.
- “Negara sudah membentuk mereka sedemikian panjangnya. Sayang kalau kompetensi itu berhenti begitu saja,” ujar Widiarto. Melalui kerja sama dengan BPSDM, anggota dilibatkan sebagai pengajar, asesor, atau tenaga teknis di Kementerian PU dan proyek-proyek strate-



■ Ir. Widiarto, Sp.I.

gis. Tujuannya memberi *certified* seperti sertifikasi resmi atau bekal keterampilan sebelum pensiun agar mereka tetap punya daya saing.

3. Sosial dan Kesehatan: Meliputi bantuan sembako, uang tunai, dan dukungan alat kesehatan bagi anggota prasejahtera. IPPU juga membantu melacak dana tabungan perumahan yang belum dicairkan oleh ratusan pensiunan melalui MoU dengan PT Tapera. Proses ini tidak mudah, karena kerap terkendala komunikasi, bahkan ada pensiunan yang mengira informasi dari IPPU sebagai penipuan.
4. Kegiatan Usaha: Demi kemandirian, IPPU membentuk koperasi yang bekerja sama dengan Indomaret di IKN, dan menyewakan lima unit mobil. Hasilnya digunakan untuk program sosial, zakat, infak, dan sedekah. Pada Lebaran 2024, IPPU berhasil menyalurkan bantuan senilai hampir 500 juta rupiah.

PENGALAMAN JADI ASET BERTHARGA

Keterlibatan anggota IPPU tidak hanya di ruang seminar, tapi juga dalam proyek di lapangan. Para pensiunan yang memahami medan, budaya lokal, dan jaringan masyarakat terbukti menjadi aset berharga.

Widiarto memberi contoh penugasan konsultan pengawas di Semarang. Alih-alih mengirim tenaga dari luar daerah yang harus beradaptasi lama, menggunakan pensiunan setempat dianggap jauh lebih efektif.

“Melibatkan pensiunan dalam proyek adalah strategi yang efisien. Mereka paham medan, mengenal LSM dan warga setempat, dan bisa langsung bekerja tanpa perlu diajari dari nol. Kalau orang berpengalaman, dia tahu tugasnya. Tidak jadi beban,” katanya.

Menurut Widiarto, tantangan utama yang dihadapi IPPU saat ini adalah kemandirian organisasi dan anggota.

“Sebagai organisasi yang lebih banyak urusan sosial itu juga butuh biaya. IPPU tidak ingin bergantung pada donasi pejabat atau pihak luar. Karena salah satu tujuan organisasi di samping sebagai wadah silaturahmi adalah bagaimana memfasilitasi teman-teman untuk bahagia jasmani rohani, salah satunya bisa mandiri di hari tua. Koperasi dan unit usaha menjadi tumpuan, sementara anggota didorong untuk mandiri secara finansial dan kesehatan di hari tua. Kalau mandiri, hari tua akan lebih bahagia. Makanya *certified* itu penting,” tegas Widiarto.

Selain sebagai wadah silaturahmi, IPPU juga berperan sebagai mentor bagi generasi muda. Pengalaman puluhan tahun para senior yang sudah pensiun menjadi jembatan transfer pengetahuan, baik di dalam proyek maupun di kegiatan pembinaan masyarakat.

Bagi Widiarto, hubungan antar-generasi ini adalah investasi moral. Ia ingin korsa Kementerian PU tetap hidup di jiwa pegawai baru, bahkan saat para senior sudah purna tugas.

“IPPU harus menjadi organisasi yang *'long live'* alias tetap hidup, relevan, dan mandiri. Baik secara kelembagaan maupun anggotanya, kemandirian adalah kunci. Kita wadah silaturahmi, tapi juga wadah pemberdayaan kompetensi. Selama anggota sehat dan mau, mereka bisa terus berkarya,” ujarnya.

Di akhir wawancara, Widiarto menyampaikan pesan yang bebas untuk ASN generasi muda PU.

“Jangan takut perubahan, karena perubahan itu abadi. Tapi satu yang tidak berubah adalah jiwa insan PU. Pengabdian tidak berhenti di masa pensiun. IPPU membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Pengalaman, dedikasi, dan korsa yang terpelihara adalah modal abadi untuk terus memberi makna. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya,” pungkasnya. ■

HUT KEMERDEKAAN RI
MEMBUAT DIASPORA
INDONESIA MENGINGAT
KEMBALI MOMENTUM
BERSEJARAH, BAHWA
PERJUANGAN
MEREKUT
KEMERDEKAAN DIRAIH
MELALUI KERINGAT,
DARAH DAN AIR MATA.

TIM REDAKSI



■ Delft

Dirgahayu Indonesia dari Brisbane dan Delft

Cerita Rian Mantasa X Bagas Mahadika

CERITA DARI BRISBANE, AUSTRALIA

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI di luar negeri menjadi salah satu yang dinantikan oleh diaspora Indonesia dan khususnya oleh para karya siswa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang tengah menjalani pendidikan lanjutan di luar negeri. HUT Kemerdekaan RI membuat Diaspora Indonesia mengingat kembali momentum bersejarah, bahwa perjuangan merebut kemerdekaan diraih melalui keringat, darah dan air mata. Cerita dari dua generasi penerus Kementerian PU yakni Rian Mantasa Salve Prastica dan Bagas Mahadika Abri Putra tentang kesan indah perayaan HUT kemerdekaan Indonesia menarik untuk dikulik.

Rian Mantasa Salve Prastica seorang karya siswa Kementerian PU yang tengah menjalani studi lanjutan di Brisbane, Australia berbagi kisah menyentuh tentang perayaan HUT RI ke-80 yang dilakukan oleh komunitas diaspora Indonesia. Rian menegaskan perayaan kemerdekaan mampu menyatukan semangat nasionalisme dan meneguhkan kembali sikap cinta tanah air.

“Bagi saya, hari kemerdekaan di luar negeri adalah momen di mana saya merasa 100% Indonesia kembali. Dalam keseharian yang penuh dengan paparan budaya lokal, sering kali saya merasa ada jarak dengan identitas saya sendiri—seolah ada bagian dari diri saya yang kurang “merdeka”. Namun, setiap kali hari kemerdekaan tiba, rasa kebangsaan itu kembali utuh,” kata Rian Mantasa Salve Prastica penerima beasiswa *Australia Awards Scholarship*, Program Studi S3 *Civil Engineering* di The University of Queensland saat dihubungi redaksi Parampara.

Rian ikut berkontribusi langsung sebagai salah satu pasukan pengibar bendera merah putih pada saat perayaan upacara HUT Indonesia selama tiga tahun berturut-turut saat tinggal di Brisbane, Australia.

Momen-momen lain seperti event pesta rakyat yang diselenggarakan oleh PPIA Queensland (Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di Queensland) dan IMCQ (Indonesian Muslim Centre of Queensland). Dinilai mampu menyatukan semangat nasionalisme diaspora Indonesia dari berbagai latar belakang profesi.

Perayaan tahunan itu menjadi ruang bersama untuk menikmati atmosfer khas Indonesia, mulai dari lomba-lomba tradisional, sajian makanan nusantara, hingga canda tawa yang mengingatkan

pada kampung halaman. Momen ini sekaligus mengingatkan ternyata di rantau seperti Brisbane, banyak anak bangsa yang sedang berjuang. Momentum ini menjadi momen langka yang sangat berharga untuk saling menguatkan, dan menjaga semangat kebangsaan bersama.

“Meski tidak semeriah perayaan di Indonesia, Agustusan di Brisbane tetap meninggalkan kesan yang hangat dan penuh makna. Suasana kebersamaan, gelak tawa saat lomba-lomba, serta aroma masakan Indonesia yang menggugah rindu kampung halaman menjadikannya momen yang indah untuk dikenang di kemudian hari. Dari tahun 2023 hingga 2025, saya mendapat kehormatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera merah putih (Paskibra), dan *insyaAllah* tahun ini kembali dipercaya mengemban tugas tersebut,” kata Rian.

SEPENGGAL KISAH DARI DELFT, BELANDA

Perayaan HUT kemerdekaan Indonesia di Delft, Belanda jelas tidak semeriah di negara aslinya. Jika perayaan HUT kemerdekaan Indonesia di tanah air sudah terasa meriah sejak awal. Di Delft tidak ada umbul-umbul, kegiatan lomba 17-an seperti di Indonesia. Bahkan bagi para diaspora yang ingin mengikuti agenda perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 harus aktif mencari informasi dan mendaftarkan diri di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kendati demikian perayaan hari kemerdekaan menjadi momentum yang ditunggu, terasa lebih syahdu dan bermakna manakala rasa nasionalisme sebagai anak bangsa kembali dibangkitkan.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Delft setiap tahun mengadakan acara foto bersama dengan membawa bendera merah putih, seraya mengenakan baju adat Nusantara sekedar untuk merayakan upacara kemerdekaan.

Selain itu, mulai tahun 2025 yang lalu PPI Delft mengadakan acara *Indelftnesia*, di mana komunitas diaspora di bawah bendera PPI memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luar negeri secara langsung melalui kegiatan pertunjukan seni, membuatik, bermain angklung, memutar film Indonesia dan sebagainya.

“Bagi saya, perayaan kemerdekaan Indonesia saat berada di luar negeri justru terasa lebih personal. Kesempatan untuk berkumpul dengan sesama warga Indonesia di Belanda terbilang jarang, dan jumlah pesertanya pun terbatas. Karena itu, momen mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, atau sekadar bercengkerama bersama menjadi pengalaman yang berharga dan penuh makna,” papar Bagas Mahadika Abri Putra karya siswa kementerian PU penerima Beasiswa LPDP, Program Studi S2 *Civil Engineering* di Delft University of Technology.

Agenda kegiatan perayaan kemerdekaan sejatinya tidak terbatas hanya pada seremonial upacara bendera, atau hanya fokus pada lomba-lomba saja. Peringatan hari kemerdekaan adalah kesempatan untuk menemukan kembali rasa cinta dan keinginan untuk membangun tanah air Indonesia, yang acap kali tenggelam diantara rutinitas kegiatan harian dan paparan sentimen negatif di media sosial.

“Sejak tinggal jauh dari Indonesia, saya menyadari ada beberapa hal yang selama ini saya anggap biasa dan kurang saya hargai ketika masih berada di tanah air. Hal-hal sederhana seperti kerinduan terhadap kuliner dan budaya Indonesia, maupun keramahmatan warganya yang tidak dapat saya temui setiap hari di sini, justru menjadi pemantik yang menguatkan rasa cinta tanah air dalam diri saya,” kata Bagas.

MAKNA MERDEKA

Memasuki Dirgahayu HUT

RI ke-80 pada 17 Agustus 2025 ini, Semangat kemerdekaan mulai bergelora dalam jiwa setiap anak bangsa. Gagap gempita perjuangan para pahlawan, menjadi pengingat bahwa bangsa ini bangsa yang tumbuh melalui perjuangan panjang dan berdarah-darah. Bukan hadiah.

Momentum kemerdekaan harus dimaknai dengan pengabdian dan kontribusi nyata untuk Indonesia. Jasa dan perjuangan para pahlawan dan mestinya diisi dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.

Indonesia sejatinya sudah merdeka dari penjajahan kolonial, namun masih terkungkung oleh penjajahan dalam dimensi baru, ketimpangan ekonomi, kesenjangan teknologi dan dominasi budaya asing. Belum lagi hak-hak rakyat sipil yang belum sepenuhnya bisa dilindungi oleh negara.

Cerita tentang memaknai kemerdekaan juga menjadi hal yang krusial bagi para diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri karena secara langsung merasakan bersentuhan dengan budaya luar yang mendominasi.

Setiap kali hari kemerdekaan tiba, rasa kebangsaan itu kembali utuh, membangkitkan kesadaran bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaan dalam menjalani prinsip hidup. Kebebasan untuk berlaku adil dalam kata dan perbuatan, menjaga integritas, dan menghindari ketidaksesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Merdeka diartikan mampu berdiri teguh pada nilai-nilai hidup bijaksana, tidak mudah disetir atau dipengaruhi orang lain.

Dewasa ini, kontribusi tidak lagi dengan mengangkat senjata melawan penjajahan. Namun turut serta menjadi agen perubahan untuk kemajuan bangsa. Saatnya kita ikut berpartisipasi aktif memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru, kecerdasan buatan generatif (*generative AI*) dan pemikiran yang aktif membangun bangsa.

Sebab setiap lompatan kemajuan membuka peluang baru, namun memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tujuan utamanya Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Meski terlihat kecil setiap orang memiliki peran tersendiri untuk berkontribusi kepada Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku. ■



■ Brisbane



■ Delft



■ Bersama Wakil Menteri PU dan Direktur Politeknik PU dalam Sidang Senat Terbuka Politeknik PU

APRI ARTOTO, S.T., M.P.P.M.,

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Dari Pegawai Harian ke Kepala BPSDM Perjalanan Panjang Integritas dan

APRI MEMEMANG
TIGA PRINSIP UTAMA
DALAM BEKERJA
YAITU INTEGRITAS
(MENYATUKAN UCAPAN
DAN PERBUATAN),
KEJUJURAN, DAN
LOYALITAS KEPADA
ATASAN DAN INSTITUSI.

TIM REDAKSI

Di balik setiap infrastruktur yang berdiri kokoh di negeri ini, ada kisah panjang perjuangan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdikan diri tanpa lelah. Di ruang kerjanya, Apri Artoto, S.T., M.P.P.M. duduk dengan tenang. Baru sebulan ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), amanah yang diberikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo. Wajahnya memancarkan ketulusan, kebanggaan sekaligus kesadaran besar akan tanggung jawab yang diembannya kini.

"Alhamdulillah beliau memberi kepercayaan. Mudah-mudahan saya bisa menjaganya. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kredibilitas organisasi, dan selalu mengedepankan integritas," ucap Apri Artoto membuka cerita panjang perjalanan kariernya.

Kepada tim redaksi Parampara ia mengisahkan awal mula bekerja di Kementerian PU. Tahun 1994, di usianya yang masih muda, Apri yang merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas Trisakti melangkah ke Kementerian PU sebagai pegawai harian. Gajinya sederhana, pekerjaannya teknis di lapangan. Hampir dua tahun ia menjalani rutinitas itu sebelum diangkat menjadi CPNS pada 1996.

"Saya memulai dari proyek, jadi staf. Lalu naik jadi asisten. Tahun 1998 pindah proyek, jadi asisten lagi. Waktu itu saya hanya fokus bekerja, belajar dari lapangan," ucap Apri yang mengaku sempat bekerja di sebuah perusahaan kontraktor selama tiga bulan sebelum masuk di Kementerian PU.

Tahun 1999, nasib baik membawanya pada kesempatan besar dengan meraih beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di University

of Southern California, Amerika Serikat (AS). Setahun kemudian, ia kembali ke tanah air pada tahun 2000 dan kembali menjadi staf pelaksana di Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan (Ditjen TPTP). Perlahan tapi pasti, anak tangga kariernya terus meningkat.

Menapaki tahun 2002, ia memulai kiprahnya sebagai Asisten Pelaksana Subdit Prasarana Transportasi Kota masih di Ditjen TPTP. Tiga tahun mengabdikan, pada 2005 ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pelaksanaan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota, Ditjen Bina Marga.

Dua tahun kemudian, pada 2007, masih di Direktorat yang

sama kariernya berlanjut sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Teknis Jembatan Kota. Jabatan ini diembannya hingga tahun 2010.

Periode 2010-2014 menjadi fase penting karena ia dipercaya menjadi Kepala Satuan Kerja (Kasatker) P2JN Metro DKI Jakarta, sebuah peran strategis yang langsung bersentuhan dengan pembangunan dan preservasi jaringan jalan nasional di ibu kota.

Kariernya kemudian berlanjut di pusat. Pada 2014-2015, pria kelahiran Palembang ini menjabat sebagai Kasi Program dan Anggaran I, Subdit Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga.

Pada tahun 2015-2016, ia kembali turun ke lapangan dengan mengemban amanah

sebagai Kasatker Akses Tanjung Priok. Pada periode ini ia turut mengawal proyek pembangunan akses Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk memperlancar arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah menuntaskan amanah tersebut, ia kembali bertugas di pusat. Pada 2020, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga. Setahun kemudian, pada 2021, ia dipercaya menjadi Kasubdit Strategi, Program, dan Anggaran pada direktorat

Tapi saya sadar yang kurang itu komunikasi antar-*stakeholder*. Jadi saya coba bangun komunikasi, koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi saat itu Pak Luhut, minta dukungan. Memang, kalau sama beliau harus serba cepat, akhirnya semua diputuskan dan semua pihak bergerak cepat, *alhamdulillah* semua bisa selesai,” ujarnya seraya menyebut dukungan penuh dari pemerintah pusat membuat semua pekerjaan selesai tepat waktu.

Bahkan di tengah hiruk pikuk penyelenggaraan KTT G20 itu, ia juga mengawal proses pembangunan ulang Jembatan Besuk Kobokan atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Gladak Perak

Kobokan itu merupakan jembatan rangka baja terpanjang saat ini sekitar 140 meter. Itu jadi satu kebanggaan bagi saya,” ujar pria yang gemar bersepeda itu.

INTEGRITAS, KEJUJURAN, LOYALITAS

Setelah 11 bulan di Jawa Timur, Apri kembali ke pusat sebagai Sekretaris BPJT pada Mei 2023. Lalu pada 4 Juli 2025, Menteri PU resmi mengangkatnya menjadi Kepala BPSDM. Di sinilah ia memegang peran strategis yakni menyiapkan SDM unggul untuk masa depan PU.

Sejak awal, Apri memegang tiga prinsip utama dalam bekerja yaitu integritas (menyatukan ucapan dan perbuatan), kejujuran, dan loyalitas kepada atasan dan institusi. Baginya, sekali kehilangan reputasi karena tidak loyal atau tidak jujur, karier akan sulit diperbaiki.

“Apa yang saya katakan dan saya lakukan menjadi kesatuan, jangan berkata A tapi tindakan B. Kemudian yang kedua jujur, karena atasan itu, kalau kita tidak jujur pasti suatu saat akan ketahuan. Saya selalu tekankan kepada anak-anak yang baru masuk jangan kalian berbuat di belakang atasan karena atasan itu telinganya pasti ada. Kemudian yang ketiga loyal kepada atasan, jangan dikhianati, pasti suatu saat kita akan ketemu lagi dengan beliau-beliau itu dan sekali kita dicap tidak loyal, itu akan

BPSDM: Sebuah an Loyalitas

yang sama.

Jabatan demi jabatan yang pernah ia emban memperlihatkan konsistensinya dalam dunia jalan dan jembatan, baik di lapangan maupun di pusat.

TANTANGAN DAN UJIAN BESAR

Tahun 2022 menjadi ujian besar bagi Apri yang bertugas sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali. Pasalnya, ia hanya punya waktu sekitar enam bulan untuk memastikan kesiapan infrastruktur jelang perhelatan akbar KTT G20 di Bali. Saat ia datang, progres baru 40 persen.

“Jujur, saya sempat pesimis. Waktu penyelenggaraan tinggal 6 bulan sementara pekerjaan di lapangan masih berantakan.

di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pascaerupsi Gunung Semeru.

“Jadi janji presiden waktu itu 1 tahun dari kejadian jembatannya sudah terbangun lagi, dan pada saat saya datang pun itu udah bulan Mei, sementara 1 tahun itu jatuhnya di 4 Desember. Itu progres baru paling 20 persen, sementara waktu sudah *mepet* sekali, ya akhirnya kita koordinasi lagi semuanya dan detail koordinasinya. Hanya saja tidak selesai pada 4 Desember, karena ternyata Semerunya erupsi lagi dan beberapa kali pekerjaan terhenti akibat erupsi. Karena kita lebih mementingkan nyawa, begitu erupsi langsung kita evakuasi setelah aman baru bekerja lagi. Dan *alhamdulillah* di bulan Maret pekerjaan selesai, Pembangunan jembatan Besuk





MENGHADAPI MILENIAL DAN GEN Z, INI AGAK UNIK. KARENA KALAU SAYA KEKEH DENGAN CARA SEPERTI DULU DIDIDIK OLEH ORANGTUA, GURU SAYA, MAKA NGGAK AKAN MUNGKIN SAYA BISA MERANGKUL MEREKA. JANGAN MERASA KITA SUDAH TAHU SEMUANYA, KARENA DI ATAS LANGIT SELALU ADA LANGIT LAGI.



mempengaruhi karier ke depan,” jelasnya.

Sebagai Kepala BPSDM, ia bertekad memetakan talenta ASN PU secara menyeluruh, dari staf hingga eselon. Tujuannya adalah menciptakan ASN berkelas dunia, kompeten secara teknis, adaptif terhadap teknologi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan etika pelayanan yang tinggi.

“Seperti pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kita ingin ASN secara kompetensi teknis dia unggul, kemudian dia juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memiliki jiwa kepemimpinan serta memiliki etika pelayanan. Jadi secara teknis kita menargetkan lima tahun ke depan itu 100 persen ASN memiliki peta kompetensi yang terdokumentasi tentunya, kemudian meningkatkan rasio pelatihan berbasis digital,” papar Apri yang pernah mengikuti pelatihan singkat tentang pengelolaan infrastruktur di negara maju seperti Inggris, Australia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

PESAN UNTUK GENERASI MUDA ASN

Terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan yang biasa dilakukan dalam sebuah organisasi, Apri menilai itu adalah hal penting agar pengalaman ASN menjadi lengkap. Karena dengan pengalaman beragam, kompetensi akan terbentuk, sehingga siap mengisi jabatan strategis.

Dirinya juga berpesan agar generasi muda ASN terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman, karena berhenti belajar berarti berhenti berkembang.

“Pesan saya yang pertama kalau jadi ASN itu harus sabar kemudian kerja keras, juga jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita capai, teruslah belajar karena begitu kita berhenti belajar ya berarti kita sampai di situ saja. Intinya jangan lelah untuk belajar, karena dunia ini perkembangannya cepat sekali,” kata Apri yang sudah tiga kali dianugerahi tanda jasa Satya Lancana Karya Satya itu.

Ia menambahkan, dalam menghadapi generasi milenial dan gen

Z, dibutuhkan cara pendekatan yang adaptif, bukan hanya berpegang pada pola lama. Jangan merasa sudah mengetahui segalanya, karena selalu ada hal baru untuk dipelajari.

“Saya sendiri merasa kalau saya tidak mengikuti perkembangan maka saya tidak akan sampai di sini, saya selalu coba mengikuti perkembangan, masih belajar menghadapi milenial dan gen Z, ini agak unik. Karena kalau saya kekeh dengan cara seperti dulu dididik oleh orangtua, guru saya, maka nggak akan mungkin saya bisa merangkul mereka. Jangan merasa kita sudah tahu semuanya, karena di atas langit selalu ada langit lagi,” tutupnya. ■





ORIENTASI CPNS

12-06-2025 - Auditorium Kementerian PU



**WORKSHOP UPSKILLING
CONTENT CREATION**

18-06-2025

Bapakom PU Wilayah IV Bandung



INTERNATIONAL WOMEN IN ENGINEERING DAY 2025

FROM INSIGHT TO IMPACT:
Advancing Women Engineers' Leadership
in Indonesia's Infrastructure Sector

Jakarta, July 2025

**INTERNATIONAL WOMEN IN
ENGINEERING DAY 2025**

03-07-2025 - Hermitage Menteng





SIDANG SENAT TERBUKA POLITEKNIK PU

15-07-2025
Poltek PU Semarang



PELATIHAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

24-07-2025
Bapekom PU Wilayah III Jakarta



PEMBEKALAN KARYASISWA MAGISTER SUPER SPESIALIS

07-08-2025
Bapekom PU Wilayah III Jakarta





SHARING SESSION GENMUD KEMENTERIAN PU

12-08-2025 - Auditorium Kementerian PU



SEMARAK HUT RI KE-80

14-08-2025 Kementerian PU



Mas Pro & Bang Ipan PU 608

Mas Pro,
aku denger-denger
dari Rakor kemarin,
Kementerian PU
punya strategi
baru ya? **PU 608**
kalo gasalah namanya,
bener ya?

Yoi, Bang Ipan!
Itu strategi utama
Kementerian PU
buat lima tahun ke depan,
biar pembangunan
infrastruktur
makin nendang!?

Tapi maksud
angka **608**
itu apa, Mas?
Kode sandi ya?
Hehe...

Wah,
ICOR itu apa,
Mas?

Bukan, Bang.
608 itu target dari
Kementerian PU
yang masing masing
ada artinya.
Angka **6** itu maksudnya
targetnya ICOR
di bawah **6**, artinya
efisiensi investasi.

0 itu
pengentasan kemiskinan
menuju **0%**.
Kita dorong supaya makin turun,
sampai akhirnya bisa **0%**! Caranya?
Dengan buka akses
infrastruktur dasar dan
serap banyak tenaga kerja.

Oke,
terus angka **0**?

Incremental Capital Output Ratio, Bang.
Semakin kecil angkanya, artinya makin efisien
modal yang kita pakai buat hasilin
pertumbuhan ekonomi!

Oke,
siap Mas Pro!
Aku jadi ngerti sekarang.
PU608 bukan sekadar
angka, tapi misi besar
Kementerian PU
buat bangsa!

Hehe,
iya Bang.
Intinya, **PU608** itu
arahan dari Menteri Dody,
selaras sama visi
Presiden Prabowo
buat wujudkan
Indonesia Maju.

Mantap!
Nah, angka **8**
pasti tentang
pertumbuhan
ekonomi ya?

Wih,
keren juga ya.
Jadi strategi **PU608**
itu singkat tapi cukup
berat ya isinya!

Bener!
Kita dorong
pertumbuhan ekonomi
dengan target **8%** per tahun,
lewat swasembada pangan,
konektivitas antarwilayah,
dan dukungan
kawasan prioritas.

PU608

80

DIRAGHAYU REPUBLIK INDONESIA

JADWAL PELATIHAN BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2025

01 Bapekom Wilayah I Medan

01 September 2025
Pelatihan Manajemen Konstruksi (BL)

09 September 2025
Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional
Bidang Keuangan APBN (K)

01 Oktober 2025
Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (DL)

27 Oktober 2025
Pelatihan Tata Persuratan
dan Kearsipan (EL)

04 Bapekom Wilayah IV Bandung

22 September 2025
Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun (K)

28 Oktober 2025
Pelatihan Fungsional Pembina
Jasa Konstruksi Ahli Pertama (K)

01 November 2025
Pelatihan KPBU Sektor Cipta Karya (EL)

07 Bapekom Wilayah VII Banjarmasin

01 September 2025
Pelatihan Beton Kinerja Tinggi
Pada Pekerjaan Jalan dan
Jembatan Sesuai Spesifikasi
Umum Bina Marga (EL)

01 September 2025
Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi

01 September 2025
Pelatihan Pengelolaan Pinjaman dan
Hibah Luar Negeri (DL)

06 September 2025
Pelatihan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (SMKK)
Jenjang Ahli Muda Keselamatan
Konstruksi (DL)

02 Bapekom Wilayah II Palembang

23 September 2025
Pelatihan Fungsional Pembina Jasa
Konstruksi Ahli Pertama (K)

06 Oktober 2025
Pelatihan KPBU Sektor Jalan
dan Jembatan (DL)

01 November 2025
Pelatihan Pengantar Penyiapan
Studi Kelayakan Proyek KPBU
Jalan Tol (EL)

05 Bapekom Wilayah V Yogyakarta

07 Oktober 2025
Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional
Bidang Keuangan APBN (K)

13 Oktober 2025
Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build)

20 Oktober 2025
Pelatihan Tata Persuratan
dan Kearsipan (EL)

01 November 2025
Pelatihan Pengantar Pengembangan
Infrastruktur Wilayah Tingkat Lanjut (EL)

11 November 2025
Pelatihan Fungsional Pembina Jasa
Konstruksi Ahli Pertama (K)

08 Bapekom Wilayah VIII Makassar

21 Oktober 2025
Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional
Bidang Keuangan APBN (K)

03 Bapekom Wilayah III Jakarta

06 Oktober 2025
Pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja
(PISK) Bidang Manajemen (EL)

27 Oktober 2025
SMKK Jenjang Ahli Madya
Keselamatan Konstruksi (DL)

01 November 2025
Pelatihan KPBU Sektor Sumber
Daya Air (EL)

06 November 2025
Pelatihan Penyelenggaraan
Proyek Infrastruktur PUPR dengan
Metodologi Building Information
Modeling (BIM) (DL)

06 Bapekom Wilayah VI Surabaya

01 September 2025
Pelatihan Perencanaan
Pengembangan Infrastruktur Terpadu
dengan Pendekatan Pengembangan
Wilayah (EL)

15 September 2025
Pelatihan Kompetensi PBJP untuk
PPK Tipe C (PBJP Level-2) (EL)

18 September 2025
Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi (DL)

22 September 2025
Pelatihan Manajemen Konstruksi (BL)

01 Oktober 2025
Pelatihan Pemeriksaan Jembatan (EL)

03 November 2025
Pelatihan Tata Persuratan dan
Kearsipan (EL)

09 Bapekom Wilayah IX Jayapura

01 September 2025
Pelatihan Kompetensi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
Level-1 (EL)

01 September 2025
Pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja
(PISK) Bidang Manajemen (DL)

15 September 2025
Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (DL)



Registrasi Pelatihan Online

<https://bpsdm.pu.go.id/halaman/diklat>

Metode Pelatihan:

(K) : Klasikal (DL) : Distance Learning
(EL) : E-Learning (BL) : Blended Learning

NB: Untuk mengetahui jadwal pelatihan lebih lanjut, dapat menghubungi Bapekom terkait.



**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum**